

KOORDINASI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) DENGAN DINAS KESEHATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA SAMARINDA

Sandy Risdyandy¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang koordinasi Komisi Penanggulangan Aids (KPA) dengan Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan hiv/aids di Kota Samarinda. Melalui beberapa indicator koordinasi yaitu kesatuan tindakan, komunikasi dan pembagian kerja, maka dapat dilihat koordinasi atau hubungan antar KPA dengan Dinas Kesehatan sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa factor yang menghambat. Dan serta dengan adanya LSM yang terkait dalam penanggulangan hiv, ini juga dapat membantu menjalankan program yang dijalankan oleh kedua instansi tersebut.

Kata Kunci : *Koordinasi KPA dengan Dinas Kesehatan Di Kota Samarinda*

Pendahuluan

Sejak HIV diidentifikasi sebagai virus penyebab (kondisi) AIDS dunia medis sudah memberikan cara-cara pencegahan yang akurat. Tapi, karena HIV dan AIDS selalu dikait-kaitkan dengan norma, moral dan agama maka pencegahan pun tidak lagi bertumpu pada fakta medis.

Kasus HIV dan AIDS di kota Samarinda merupakan tertinggi diantara kabupaten/kota se-Kaltim. Dan setiap tahunnya juga kasus hiv ini semakin bertambah. Sejak ditemukan pertama kali tahun 1997 hingga saat ini tercatat 813 orang (Desember 2012/KPA kota Samarinda) terinfeksi HIV dan yang meninggal dunia sebanyak 155 orang dan tersebar di semua kecamatan di Samarinda.

Sebenarnya dalam penanggulangan HIV dan AIDS ini, berbagai tindakan telah dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab, namun nampaknya hal itu tidak dilakukan secara komprehensif melainkan lebih pada tindakan taktis untuk periode jangka pendek. Sebagai contoh, sepanjang yang peneliti ketahui belum ada peraturan (misalnya : peraturan daerah) yang telah dibuat untuk penggunaan kondom pada semua pelanggan pekerja seks yang ada hanya anjuran penggunaan kondom pada pelanggan pekerja seks.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: shandy_wima@yahoo.co.id

Penyebab penyebaran virus HIV dan AIDS terbanyak melalui hubungan seksual secara bebas mencapai 75 persen dari penyebab lainnya. Penularan HIV melalui hubungan seksual bisa terjadi di dalam dan di luar ikatan pernikahan yang sah jika salah satu dari pasangan itu mengidap HIV dan laki-laki tidak memakai kondom.

Sebenarnya dalam penanggulangan HIV dan AIDS ini, berbagai tindakan telah dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab, namun nampaknya hal itu tidak dilakukan secara komprehensif melainkan lebih pada tindakan taktis untuk periode jangka pendek. Sebagai contoh, sepanjang yang peneliti ketahui belum ada peraturan (misalnya : peraturan daerah) yang telah dibuat untuk penggunaan kondom pada semua pelanggan pekerja seks yang ada hanya anjuran penggunaan kondom pada pelanggan pekerja seks.

Adapun koordinasi yang dilakukan pemerintah kota Samarinda dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS membentuk instansi yang disebut Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kota Samarinda yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Namun instansi penanggulangan HIV dan AIDS di pisahkan dengan instansi Dinas Kesehatan, dimana pelayanan kesehatan masyarakat dikelola oleh Dinas Kesehatan setempat. Dan juga adanya Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat (LSM) yang ikut membantu dalam permasalahan HIV dan AIDS, contohnya Yayasan LARAS membantu Pemerintah Kota (Dinas Kesehatan) dan KPA dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Dengan adanya Komisi Penanggulangan Aids (KPA) diharapkan dapat membantu dan bekerja sama dengan pemerintah kota khususnya Dinas Kesehatan agar dapat menanggulangi penyebaran virus HIV dan AIDS yang setiap tahunnya makin bertambah. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antara kedua instansi tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya.

Menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).

Menurut Awaludin Djamin dalam Hasibuan (2007:86) koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Faktor – factor Yang Mempengaruhi Koordinasi

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa indikator yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upayayang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut

:

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan.
3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.

c. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiangdasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil denganbaik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja.

Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorang pun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

Tujuan Koordinasi

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa Adapun manfaat koordinasi antara lain:

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
- c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.

- d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
- e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Pengertian HIV/AIDS

HIV adalah singkatan Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga membuat tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah suatu penyakit retrovirus yang disebabkan oleh HIV dan ditandai dengan immunosupresi berat yang menimbulkan infeksi oportunistik, neoplasma sekunder dan manifestasi neurologis. (Vinay Kumar, 2007). HIV telah ditetapkan sebagai agens penyebab acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS). AIDS adalah suatu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV. (Sylvia Anderson Price, 2006)

Penanggulangan HIV/AIDS

Berikut ini, 4 rumusan tindakan strategis yang dapat dilakukan guna meningkatkan penanggulangan HIV/AIDS :

Strategi 1 : Menyediakan dan meningkatkan sitem penanggulangan HIV/AIDS. Sistem penanggulangan HIV/AIDS sudah ada di beberapa daerah dimana pencegahan dan perawatan bagi orang terinfeksi dilengkapi dengan sistem itu. Namun sistem yang ada belum terintegasi dengan baik dan tidak memiliki perawatan yang memadai. Bahkan ada beberapa kota yang belum memiliki sistem penanggulangan HIV/AIDS sama sekali. Oleh karena itu pencegahan dan perawatan dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah prioritas utama yang harus dilakukan. Secara teknis pemerintah daerah harus menyediakan dan meningkatkan sistem penanggulangan HIV/AIDS tersebut.

Strategi 2 : Menata institusi teknis pemerintah dan membuat peraturan. Instansi yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan peningkatan penanggulangan HIV/AIDS perlu ditingkatkan dengan melibatkan dengan beberapa instansi lainnya dibawah koordinasi kantor walikota. Oleh karena, secara substansial penyediaan dan peningkatan penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dipisahkan maka peran KPA, DINKES, dll hendaknya mempunyai komitmen yang kuat dalam penanggulangan HIV/AIDS pada masing – masing kota. Disamping itu peraturan pada tingkat peraturan daerah perlu diadakan sebagai instrumen dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Strategi 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang potensial untuk menunjang penanggulangan HIV/AIDS, Oleh karena itu, sangat penting pemerintah melakukan tindakan guna meningkatkan, memperbaiki dan partisipasi kesadaran masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan berupa penyebaran informasi, membuat program yang berhubungan dengan penanggulangan HIV/AIDS, Peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (Misalnya : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di tingkat kelurahan) untuk memberikan informasi yang tepat tentang HIV/AIDS pada warga. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan guna

mencegah infeksi baru pada masyarakat luas serta menurunkan stigma dan diskriminasi pada odha.

Strategi 4 : Mencari dana penunjang dari masyarakat dan swasta. Secara umum, sumber keuangan untuk penanggulangan HIV/AIDS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD). Sumber keuangan lain yang berpotensi sebagai penunjang dapat berasal dari pihak masyarakat atau swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa penanggulangan HIV/AIDS melibatkan semua pihak misalnya pihak yang menyediakan tempat hiburan malam (cafe, lokalisasi, diskotik, dll) dan masyarakat. Dana dapat diperoleh dengan cara membayar retribusi atau pajak bagi pihak-pihak yang menyediakan tempat hiburan malam. Namun, semua tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan peraturan resmi pemerintah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Nawawi (1998:9) mengatakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai *model interaktif*. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin- menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, 2007).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Koordinasi Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Dengan Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Hiv/Aids Di Kota Samarinda

Dalam artikel ini yang menjadi pokok bahasan Koordinasi Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Dengan Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Hiv/Aids Di Kota Samarinda, penulis akan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan beberapa fokus penelitian, sebagai berikut :

a. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan antar Komisi Penanggulangan AIDS dengan Dinas Kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam koordinasi kedua instansi tersebut yang penulis teliti, dimana kesadaran setiap anggota instansi baik dari KPA Kota Samarinda maupun dari Dinas Kesehatan untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dan

agar usaha-usaha setiap kegiatan dalam pembangunan sejalan dengan tugas mereka masing-masing sehingga bisa mendapatkan keserasian dalam mencapai hasil. Misalnya, tugas KPA dalam mengurangi atau menanggulangi kasus HIV dan AIDS adalah dengan cara penyuluhan dan sosialisasi ke tempat-tempat lokalisasi atau ke tempat-tempat yang rentan tertularnya penyakit HIV. Sedangkan tugas Dinas Kesehatan adalah memberikan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ingin diperiksa mengenai penyakit HIV dan memberikan pengobatan dan perawatan terhadap orang yang hidup atau terdampak langsung oleh HIV dan AIDS (ODHA). Kesatuan tindakan antara KPA Kota Samarinda dengan Dinas Kesehatan sudah terlaksana. KPA Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan mampu menyatukan pendapat mereka meskipun sering sekali terjadi perbedaan pendapat, namun hal tersebut tidak pernah memunculkan konflik diantara KPA Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan. Adanya upaya-upaya yang dilakukan antara KPA Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan untuk menyatukan pendapat mereka dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS sehingga dengan upaya-upaya tersebut kedua instansi ini bisa menyatukan persepsi mereka untuk menentukan program-program dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda.

b. Komunikasi

Dalam Komunikasi merupakan hubungan dimana terdapat tukar menukar pendapat atau informasi di antara anggota atau kelompok baik dari KPA Kota Samarinda maupun dari Dinas Kesehatan untuk mencapai saling pengertian antara kedua belah pihak. Komunikasi dalam koordinasi antara KPA Kota Samarinda dengan Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS sudah terjalin. Jarangnya melakukan pertemuan atau rapat antara kedua instansi tersebut bisa menghambat proses komunikasi yang terjalin antara KPA Kota Samarinda dengan Dinas Kesehatan. Namun demikian, komunikasi tetap terlaksana meskipun kurang pertemuan yang dilakukan antara kedua instansi tersebut, KPA Kota Samarinda dengan Dinas Kesehatan tetap berkomunikasi baik melalui telepon langsung dan melalui SMS. Karena masih banyak program penanggulangan yang belum dilaksanakan, maka komunikasi antara KPA dengan Dinas Kesehatan yang sudah berlangsung mesti dipertahankan untuk pelaksanaan program penanggulangan yang belum berjalan. Selain itu perlunya kesadaran bagi anggota masing-masing instansi agar lebih sering hadir dalam rapat atau dalam menjalankan program seperti sosialisasi maupun penyuluhan untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkomunikasi antar masing-masing instansi. Misalnya saja pertemuan antara kedua instansi ini dilakukan minimal 3 sampai 5 kali dalam sebulan agar komunikasi antara kedua instansi makin erat dan berjalan dengan baik.

c. Pembagian Kerja

Pembagian kerja selalu dilakukan oleh KPA Kota Samarinda dengan Dinas Kesehatan adalah untuk meringankan program-program yang akan dilaksanakan serta untuk mewujudkan hasil yang baik dalam proses upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda. Namun KPA Kota

Samarinda dengan Dinas Kesehatan harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin agar apa yang direncanakan bisa selalu berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Dengan pembagian kerja diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Pembagian kerja antara kedua instansi tersebut ialah dari pihak KPA lebih dominan pada penyuluhan dan sosialisasi ke lokalisasi-lokalisasi yang berada di Samarinda maupun di lingkungan masyarakat umum sedangkan Dinas Kesehatan pada pemeriksaan tes darah pada orang-orang yang ingin diperiksa atau orang-orang yang merasa mempunyai gejala terkena virus Hiv.

Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Dengan Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Hiv/Aids Di Kota Samarinda

Hambatan dan Pendorong

Telah diketahui pembahasan mengenai fokus penelitian yang dipaparkan di atas. Dari pembahasan tersebut dapat diketahui mengetahui Koordinasi Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Dengan Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Hiv/Aids Di Kota Samarinda yang diketahui sudah berjalan dengan cukup baik namun tidak serta merta berjalan mulus, di balik itu semua terdapat hal yang dinamakan hambatan dan pendorong. Hambatan yang dihadapi adalah mekanisme penganggaran APBD KPA melalui SKPD dan dana bansos/hibah (dari APBD) tidak bisa diterima setiap tahun. Serta anggaran KPA yang berasal dari global fund (GF-SSR) akan berakhir pada 30 Juni 2015. Maka itu akan menghambat proses pelaksanaan program yang ingin dijalankan dan secara tidak langsung juga menghambat dan mengganggu proses koordinasi. Namun terdapat pula pendorong dalam koordinasi antar kedua instansi tersebut. Diantara faktor-faktor pendorongnya yaitu persamaan visi atau tujuan dalam upaya penanggulangan kasus Hiv menjadikan KPA dengan Dinas Kesehatan. Serta juga adanya komunikasi yang baik antara KPA dengan Dinas Kesehatan, ini dapat menjadikan hubungan antara kedua instansi berjalan dengan baik dan dapat diharapkan bisa menanggulangi kasus HIV yang setiap tahunnya semakin bertambah di Kota Samarinda.

Kesimpulan

Koordinasi Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Dengan Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS Di Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik dan beberapa hal yang mempengaruhi koordinasi tersebut dipaparkan di bawah ini yang terdiri dari:

- a. Kesatuan tindakan antara KPA Kota Samarinda dengan Dinas Kesehatan sudah terlaksana. KPA Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan mampu menyatukan pendapat mereka meskipun sering sekali terjadi perbedaan pendapat, namun hal tersebut tidak pernah memunculkan konflik diantara KPA Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan. Adanya upaya-upaya yang dilakukan antara KPA Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan untuk menyatukan pendapat mereka dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS sehingga dengan upaya-upaya tersebut kedua instansi ini bisa menyatukan persepsi mereka untuk menentukan program-program dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda.
- b. Komunikasi dalam koordinasi antara KPA Kota Samarinda dengan Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS sudah terjalin. Jarangnya melakukan pertemuan atau rapat antara kedua instansi tersebut bisa menghambat proses komunikasi yang terjalin antara KPA Kota Samarinda dengan Dinas Kesehatan. Namun demikian, komunikasi tetap terlaksana meskipun kurang pertemuan yang dilakukan antara kedua instansi tersebut, KPA Kota Samarinda dengan Dinas Kesehatan tetap berkomunikasi baik melalui telepon langsung dan melalui SMS. Namun kadangkala memang ada orang-orang yang ada didalam masing-masing instansi tersebut jarang melakukan komunikasi dengan orang-orang yang memang bertugas dalam menangani kasus HIV di Kota Samarinda.
- c. Pembagian kerja antar dua lembaga tersebut sudah sesuai dengan bidangnya tiap masing-masing instansi, dimana kedua instansi tersebut juga saling bantu dan membantu dalam setiap menjalankan program yang akan dilaksanakan. Keberhasilan itu tidak terlepas dari pembagian tugas yang saling bantu membantu baik dari dalam instansi maupun antar kedua instansi tersebut.

Rekomendasi

Karena masih ada program penanggulangan yang belum dilaksanakan dan setiap tahunnya kasus HIV semakin bertambah, maka kesatuan tindakan, pembagian kerja antara KPA dengan Dinas Kesehatan yang berlangsung mesti dipertahankan untuk pelaksanaan program pembangunan yang belum berjalan. Kedua Instansi ini juga harus lebih memahami dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam menanggulangi HIV terutama pada orang-orang terkena HIV yang belum terdata dan dirinya belum mengetahui terkena virus HIV. Dan juga sebaiknya dari setiap RT/RW di Kota Samarinda, sebaiknya ada pendataan yang lebih terperinci pada orang yang terkena penyakit HIV, agar KPA maupun Dinas Kesehatan dapat mendata dan diberi pengarahan agar mereka yang terkena virus HIV bisa hidup seperti orang pada umumnya dan biasa mempunyai kepercayaan diri dalam menjalankan hidupnya. Serta juga komunikasi antara KPA dengan Dinas Kesehatan yang sudah berlangsung mesti dipertahankan untuk pelaksanaan program penanggulangan yang belum berjalan. Selain itu perlunya kesadaran bagi anggota masing-masing instansi

agar lebih sering hadir dalam rapat atau dalam menjalankan program seperti sosialisasi maupun penyuluhan untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkomunikasi antar masing-masing instansi. Misalnya saja pertemuan antara kedua instansi ini dilakukan minimal 3 sampai 5 kali dalam sebulan agar komunikasi antara kedua instansi makin erat dan berjalan dengan baik. Selain itu juga adanya kesadaran masing-masing instansi agar bisa lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya dan yang paling terpenting adalah dapat mengurangi kasus HIV dan AIDS di Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

- Abdulrachman, Arifin., 1979, *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*, Ichtiar Baru Van I loeve, Jakarta.
- Dann Suganda., 1991, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia*, Jakarta.
- Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1997, *Organisasi Jilid I*, Terjemahan Darkasih. Jakarta: Erlangga.
- Hadari Nawawi, 2003, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Handayani, Soewarno. (1985). *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: CV Mas Agung.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Cetakan Kedelapanbelas. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Kumar Vinay, dkk. 2007. *Buku Ajar Patologi Robbins Edisi 7 Volume 2*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Miles, Mathew. B dan A. Micheal Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. University Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Price, Sylvia Anderson. (2006). *Patofisiologi : Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*. Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.

Sumber Internet :

- Harahap, W, Syaiful. 2010. Penyebaran AIDS di Kalimantan Timur, <http://edukasi.kompasiana.com/2010/11/25/penyebaran-aids-di-kalimantan-timur/>).
- Pengertian HIV AIDS atau Definisi Lengkap Tentang HIV & AIDS, <http://www.jogang.com/2012/06/pengertian-hiv-aids-atau-definisi.html>

Peraturan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda,
<http://jdih.depdagri.go.id/semua.php?KWil=6472>.
Profil Dinas Kesehatan Kota Samarinda
<http://www.dinkeskotasamarinda.com/?p=9>